KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Pastikan Legislasi tidak Surut
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Pastikan Legislasi tidak Surut

Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya hanya akan dihadiri maksimal 30% peserta. Sisanya mengikuti secara daring.

Sri Utami
ami@mediaindonesia.com

ALAT-ALAT kelengkapan dewan (AKD) memastikan kebijakan pimpinan DPR untuk menghentikan sementara rapat-rapat tatap muka dan memaksimalkan kerja melalui daring tidak akan menyurutkan kinerja parlemen.

Berbagai pembahasan rancangan undang-undang (RUU), termasuk rapat kerja dengan pemerintah yang sudah dijadwalkan di setiap komisi, akan tetap dibahas secara daring oleh DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta saat dihubungi, kemarin, menerangkan semua yang telah dijadwalkan harus tetap dikerjakan untuk dibahas komisi meskipun telah diberlakukan kerja dari rumah (WFH), kemarin.

"Iya, dibahas secara virtual seperti PDP (RUU Perlindungan Data Pribadi) itu sangat dibutuhkan dan harus disegerakan. Jadi, akan dibahas secara virtual. Seperti rapat dengan mitra kelanjutan kemarin, RUU Penyiaran, PDP banyak sekali dan jadwalnya padat," ujar Sukamta.

Dia mengungkapkan, terkait dengan RUU PDP, saat ini Komisi I DPR masih menunggu kabar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melanjutkan pembahasan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera yang menekankan berbagai pembahasan penting DPR yang telah ditetapkan harus dikupas tuntas meskipun di tengah keterbatasan akibat kembali melonjaknya kasus covid-19.

"Kami tidak boleh kalah dengan pandemi atau covid-19. Semua yang terjadwal dibahas, jika ditunda, bisa memperburuk pelayanan pada warganya," ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan keputusan menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas di gedung parlemen sesuai dengan hasil rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sistem kerja kedinasan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50% per hari.

"Rapat-rapat komisi dan AKD dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30% peserta dan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai dengan jam kantor masa pembatasan sosial," jelas Puan.

Puan menyebut rapat fisik yang berlangsung di Gedung DPR boleh dilakukan maksimal dengan durasi 2 jam. Pihak-pihak yang hadir di dalam rapat kerja pun dibatasi.

Aturan pembatasan di area Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, mulai berlaku sejak 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Berdasarkan data Setjen DPR sejak Rabu (2/2), sembilan anggota dan 80 pegawai DPR positif covid-19. Mereka sedang menjalani isolasi mandiri dan perawatan.

Bentuk panja

Dalam kaitan kerja legislasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi tersebut sesuai dengan pendapat para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan panitia kerja (panja) RUU PPP akan segera dibentuk. Pihaknya meminta kepala kelompok badan di Baleg untuk menyiapkan nama-nama untuk masuk panja.

"Jadi, ini hanya soal penegasan, satu, menyangkut soal metode *omnibus law*. Tidak sekadar menampung pendapat yang menjadi putusan MK karena putusan MK terkait putusan *omnibus law* itu tidak ada amarnya satu pun," ujar Supratman. (P-2)